



مجلة الاقتصاد الإسلامي

Al-Fadilah: Islamic Economics Journal

E-ISSN: 3031-0210

<https://doi.org/10.61166/fadilah.v3i1.64>

Vol. 3 No. 2 (2025)

pp. 180-194

Research Article

Transparansi Dan Akuntabilitas Dana Pensiun Syariah: Sebuah Tinjauan Sistematis Literatur

Fidya Puji Ramadhani¹, Taufiqur Rahman²

1. Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia; 230721100207@student.trunojoyo.ac.id
2. Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia; taufiqur.rahman@trunojoyo.ac.id

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Al-Fadilah: Islamic Economics Journal**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : September 28, 2025

Revised : October 23, 2025

Accepted : November 16, 2025

Available online : Desember 01, 2025

How to Cite: Fidya Puji Ramadhani, & Taufiqur Rahman. (2025). Transparency and Accountability of Islamic Pension Funds: A Systematic Review of the Literature. *Al-Fadilah: Islamic Economics Journal*, 3(2), 180–194. <https://doi.org/10.61166/fadilah.v3i2.64>

Transparency and Accountability of Islamic Pension Funds: A Systematic Review of the Literature

Abstract. This study aims to systematically analyze the literature related to the transparency and accountability of Islamic pension funds. Using a Systematic Literature Review (SLR) approach with the PRISMA protocol, this study identifies Islamic pension fund management practices, financial reporting mechanisms, the role of the Sharia Supervisory Board (SSB), technology implementation, and Sharia audit standards. A literature search was conducted in the Scopus, Web of Science, Emerald, EBSCO, and SINTA databases, covering the period 2013-2024, yielding 25 relevant articles for analysis after a screening process. The results indicate that the transparency of Islamic pension funds still faces challenges in terms of reporting standardization, investment information disclosure, and Sharia

supervision. The integration of technologies such as blockchain and AI is beginning to be implemented to enhance transparency, although this is still limited to countries with advanced Islamic financial systems. This study contributes to the development of a comprehensive accountability framework for Islamic pension funds and identifies areas for future research in the context of the evolution of the global Islamic finance industry.

Keywords: Sharia Pension Fund, Transparency, Accountability, Sharia Supervisory Board, Financial Technology, Sharia Audit.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara sistematis literatur terkait transparansi dan akuntabilitas dana pensiun syariah. Melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR) dengan protokol PRISMA, penelitian ini mengidentifikasi praktik-praktik pengelolaan dana pensiun syariah, mekanisme pelaporan keuangan, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), implementasi teknologi, dan standar audit syariah. Pencarian literatur dilakukan pada database Scopus, Web of Science, Emerald, EBSCO, dan SINTA, dengan rentang waktu 2013-2024, menghasilkan 25 artikel yang relevan untuk dianalisis setelah melalui proses screening. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dana pensiun syariah masih menghadapi tantangan dalam hal standarisasi pelaporan, keterbukaan informasi investasi, dan pengawasan syariah. Integrasi teknologi seperti blockchain dan AI mulai diimplementasikan untuk meningkatkan transparansi, meskipun masih terbatas pada negara-negara dengan sistem keuangan syariah yang maju. Studi ini berkontribusi pada pengembangan kerangka kerja akuntabilitas yang komprehensif untuk dana pensiun syariah dan mengidentifikasi area penelitian masa depan dalam konteks evolusi industri keuangan syariah global.

Kata kunci: Dana Pensiun Syariah, Transparansi, Akuntabilitas, Dewan Pengawas Syariah, Teknologi Finansial, Audit Syariah.

PENDAHULUAN

Dana pensiun syariah merupakan instrumen keuangan yang memiliki peran strategis dalam menyediakan jaminan kesejahteraan di masa pensiun dengan tetap patuh pada prinsip-prinsip syariah (Rizkia et al., 2024). Berbeda dengan dana pensiun konvensional, dana pensiun syariah mengadopsi konsep tabarru' (donasi) dan wakalah (perwakilan) dalam operasionalnya, menjadikan faktor transparansi dan akuntabilitas sebagai elemen krusial dalam pengelolaannya (Walid In'am Ahmad, 2025). Sejalan dengan pertumbuhan industri keuangan syariah global yang mencapai US\$2,88 triliun pada tahun 2023 (Ivazada Marella Edgina, SE., M.E.Sy., 2023), kebutuhan akan mekanisme transparansi dan akuntabilitas yang sesuai dengan prinsip syariah semakin mendesak untuk dikaji secara komprehensif.

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas tentang dana pensiun syariah, terdapat kesenjangan literatur terkait praktik transparansi dan akuntabilitas secara spesifik. Rangga menyoroti bahwa studi mengenai dana pensiun syariah masih berfokus pada aspek kesesuaian produk dengan syariah (shariah compliance) dan strategi investasi, sementara aspek pelaporan, pengawasan, dan transparansi belum dikaji secara mendalam (Rangga Ananda Ardiyansa, Risma Aulia Irawan, Wildan Taupiqur Rahman Chudory, 2024). Sementara itu, Tulus Pujo Nugroho mengidentifikasi adanya variasi signifikan dalam praktik transparansi antara lembaga keuangan syariah di berbagai negara, yang menimbulkan pertanyaan tentang harmonisasi standar akuntabilitas (Nugroho, 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan melakukan tinjauan sistematis terhadap literatur yang membahas transparansi dan akuntabilitas dana pensiun syariah. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi praktik-praktik transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan dalam pengelolaan dana pensiun syariah, Menganalisis peran Dewan Pengawas Syariah dalam meningkatkan akuntabilitas, Mengkaji implementasi teknologi dalam meningkatkan transparansi dana pensiun syariah, Mengevaluasi standar audit syariah yang berkaitan dengan dana pensiun.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini didasarkan pada pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pensiun syariah diterapkan?
2. Bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah dalam memastikan akuntabilitas dana pensiun syariah?
3. Sejauh mana teknologi diimplementasikan untuk meningkatkan transparansi dana pensiun syariah?
4. Bagaimana standar audit syariah diterapkan dalam konteks dana pensiun syariah?

METODE PENELITIAN

1. Desain Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan Systematic Literature Review (SLR) mengikuti protokol PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Metode SLR dipilih karena kemampuannya dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menginterpretasikan penelitian-penelitian yang relevan dengan pertanyaan penelitian secara sistematis dan komprehensif. Protokol PRISMA memastikan transparansi dan reproduktibilitas dalam proses tinjauan, sehingga meningkatkan kualitas dan reliabilitas hasil penelitian.

2. Strategi Pencarian

Pencarian literatur dilakukan pada database elektronik terkemuka yang mencakup penelitian di bidang keuangan syariah dan dana pensiun. Database yang digunakan meliputi:

1. Scopus
2. Web of Science
3. Emerald Insight
4. EBSCO Business Source Premier
5. SINTA (Science and Technology Index)

3. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Dalam proses seleksi artikel, diterapkan kriteria inklusi dan eksklusi sebagai berikut:

Kriteria Inklusi:

1. Artikel yang dipublikasikan antara tahun 2013 hingga 2024
2. Artikel dalam bahasa Inggris atau Indonesia
3. Artikel yang diterbitkan di jurnal peer-reviewed atau prosiding konferensi bereputasi
4. Artikel yang secara spesifik membahas aspek transparansi dan/atau akuntabilitas

dana pensiun syariah

5. Artikel yang mencakup pembahasan tentang pelaporan keuangan, Dewan Pengawas Syariah, teknologi, atau standar audit dalam konteks dana pensiun syariah

Kriteria Eksklusi:

1. Artikel yang dipublikasikan sebelum tahun 2013
2. Artikel berbahasa selain Inggris dan Indonesia
3. Artikel non-ilmiah, seperti artikel opini atau berita
4. Artikel yang hanya membahas dana pensiun konvensional tanpa konteks syariah
5. Artikel yang berfokus pada aspek lain dari dana pensiun syariah tanpa membahas transparansi atau akuntabilitas.

4. Proses Seleksi

Pencarian awal menghasilkan 50 artikel. Setelah menghapus duplikasi, tersisa 42 artikel untuk diskriminasi. Berdasarkan judul dan abstrak, 4 artikel dikecualikan karena tidak relevan dengan topik penelitian. Dari 38 artikel yang tersisa, dilakukan pemeriksaan teks lengkap, menghasilkan 36 artikel yang memenuhi semua kriteria inklusi dan eksklusi untuk analisis akhir.

5. Ekstraksi dan Analisis Data

Data dari 36 artikel terpilih diekstraksi menggunakan formulir ekstraksi data terstruktur yang mencakup informasi berikut:

1. Informasi bibliografi (penulis, tahun, judul, jurnal)
2. Metode penelitian (desain, sampel, teknik analisis)
3. Temuan utama terkait praktik transparansi dan akuntabilitas
4. Informasi tentang peran Dewan Pengawas Syariah
5. Penggunaan teknologi dalam meningkatkan transparansi
6. Implementasi standar audit syariah
7. Rekomendasi untuk praktik dan penelitian masa depan

Data yang diekstraksi kemudian dianalisis menggunakan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema utama yang muncul dari literatur. Analisis tematik ini dilakukan secara sistematis melalui proses coding, kategorisasi, dan pengembangan tema, yang memungkinkan peneliti untuk mensintesis temuan dari berbagai artikel dan mengidentifikasi tren dan kesenjangan dalam penelitian.

KAJIAN LITERATUR

Karakteristik Studi

Analisis terhadap 36 artikel terpilih menunjukkan distribusi publikasi yang cenderung meningkat dalam dekade terakhir, dengan lonjakan signifikan sejak tahun 2018, yang mengindikasikan pertumbuhan minat akademis terhadap isu transparansi dan akuntabilitas dana pensiun syariah. Distribusi geografis penelitian didominasi oleh studi dari Malaysia (32%), Indonesia (24%), Arab Saudi (16%), dan negara-negara lain termasuk Bahrain, Uni Emirat Arab, Pakistan, dan Inggris. Mayoritas penelitian mengadopsi pendekatan kualitatif (56%), diikuti oleh metode campuran (28%), dan kuantitatif (16%).

Berdasarkan klasifikasi tematik, artikel-artikel tersebut dapat dikategorikan ke dalam empat tema utama, yaitu: Praktik transparansi dan akuntabilitas (9 artikel), Peran Dewan Pengawas Syariah (6 artikel), Implementasi teknologi (5 artikel) dan Standar audit syariah (5 artikel). Tabel 1 menyajikan ringkasan distribusi artikel berdasarkan tema penelitian dan tahun publikasi.

Table 1 : Distribusi artikel Berdasarkan Tema dan Tahun Publikasi

Tema Penelitian	2013- 2015	2016- 2018	2019- 2021	2022- 2024	Total
Praktik Transparansi dan akuntabilitas	1	2	3	3	9
Peran Dewan Pengawas Syariah	0	2	2	2	6
Implementasi Teknologi	0	1	2	2	5
Standar Audit Syariah	1	1	1	2	5
Total	2	4	8	9	25

Praktik Transparansi dan Akuntabilitas Dana Pensiun Syariah

Kajian literatur mengungkapkan variasi signifikan dalam praktik transparansi dan akuntabilitas dana pensiun syariah di berbagai yurisdiksi. Pangestu mengidentifikasi bahwa regulasi menjadi faktor penentu utama dalam tingkat transparansi yang diterapkan, dengan Malaysia dan Bahrain menunjukkan kerangka regulasi yang lebih komprehensif dibandingkan negara-negara lain (Pangestu et al., 2024). Studi yang dilakukan oleh Husni Rizalul menunjukkan bahwa dana pensiun syariah di negara-negara dengan dual financial system cenderung mengadopsi praktik transparansi yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara yang sistem keuangan syariahnya masih berkembang (Naufal Muhamad Shodiqin, Husni Rizallul Muslim, 2024).

(Ash-Shiddiqy, 2023) mengidentifikasi lima dimensi utama transparansi dalam pengelolaan dana pensiun syariah yaitu pengungkapan informasi investasi, mekanisme penyaringan syariah, distribusi surplus, pengungkapan biaya dan fee, pengungkapan risiko. Dari kelima dimensi tersebut, pengungkapan informasi investasi dan mekanisme penyaringan syariah merupakan aspek yang paling sering diimplementasikan, sementara pengungkapan risiko masih menjadi aspek yang kurang mendapat perhatian.

Terkait dengan mekanisme pelaporan keuangan, (Subardi, 2019) menemukan bahwa adopsi standar akuntansi khusus untuk lembaga keuangan syariah, seperti Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), secara signifikan meningkatkan tingkat transparansi dana pensiun syariah. Namun, (Eka Arlinda Hafid, Sri Nurul Nabila, Kamaruddin, 2024) menggarisbawahi bahwa banyak dana pensiun syariah yang masih menggunakan standar akuntansi konvensional dengan beberapa modifikasi untuk memenuhi persyaratan syariah, yang mengakibatkan inkonsistensi dalam pelaporan dan keterbatasan transparansi.

Dalam konteks Indonesia, mengidentifikasi bahwa transparansi dana pensiun syariah masih menghadapi tantangan dalam hal standarisasi pelaporan dan

kepatuhan terhadap prinsip syariah. Studi tersebut menunjukkan bahwa dari 15 dana pensiun syariah yang dianalisis, hanya 60% yang melaporkan rincian investasi berdasarkan instrumen syariah secara komprehensif, sementara sisanya hanya memberikan informasi agregat tanpa rincian spesifik tentang kesesuaian dengan prinsip syariah (Purbaningrum et al., 2024).

Peran Dewan Pengawas Syariah dan Akuntabilitas

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memainkan peran krusial dalam memastikan akuntabilitas dana pensiun syariah. Kajian literatur menunjukkan fokus pada tiga aspek utama yaitu struktur dan independensi, mekanisme pengawasan, dan efektivitas dalam memastikan kepatuhan syariah.

(A. F. Putri, 2023) mengeksplorasi struktur dan independensi DPS, menemukan bahwa komposisi DPS yang beragam dengan keahlian di bidang keuangan syariah dan hukum Islam sangat penting untuk pengawasan yang efektif. Studi ini juga mengidentifikasi bahwa independensi DPS sering kali dikompromikan oleh konflik kepentingan, terutama ketika anggota DPS menjabat di beberapa lembaga keuangan syariah secara bersamaan. Menurut (Dahlan et al., 2016), dana pensiun syariah di Malaysia telah mengadopsi model pengawasan terpusat melalui Shariah Advisory Council di bawah Bank Negara Malaysia, yang membantu standardisasi keputusan syariah dan mengurangi risiko konflik kepentingan.

Terkait mekanisme pengawasan, (Rama, 2015) mengidentifikasi bahwa DPS pada umumnya melakukan tiga jenis pengawasan: *ex-ante* (persetujuan produk dan kontrak), *ongoing* (pemantauan operasional), dan *ex-post* (audit syariah). Namun, penelitian tersebut menemukan bahwa pengawasan *ex-post* seringkali kurang mendapat perhatian, dengan hanya 47% dana pensiun syariah yang diteliti menerapkan audit syariah secara komprehensif.

Mengenai efektivitas DPS, (Naufal Muhamad Shodiqin, Husni Rizallul Muslim, 2024) menganalisis dampak karakteristik DPS terhadap kinerja dan transparansi dana pensiun syariah. Studi tersebut menemukan bahwa ukuran DPS yang lebih besar dan frekuensi pertemuan yang lebih tinggi berkorelasi positif dengan tingkat transparansi, sedangkan latar belakang pendidikan anggota DPS dalam bidang keuangan dan ekonomi Islam berkontribusi pada pengawasan yang lebih efektif. Namun, (L. A. Putri & Nurbaiti, 2024) memperingatkan bahwa efektivitas DPS juga dipengaruhi oleh dukungan organisasional dan akses terhadap informasi yang relevan, yang sering kali menjadi tantangan dalam praktiknya.

Di Indonesia, (Lestari et al., 2023) menemukan bahwa peran DPS dalam dana pensiun syariah masih terbatas pada fungsi *advisory* dan belum sepenuhnya mengambil peran pengawasan aktif. Studi ini mengidentifikasi bahwa dari 12 dana pensiun syariah yang diteliti, hanya 4 yang memiliki DPS dengan keterlibatan penuh dalam proses pengawasan operasional, sedangkan mayoritas masih berfokus pada aspek kesesuaian produk dengan syariah.

Implementasi Teknologi dalam Meningkatkan Transparansi

Perkembangan teknologi membawa implikasi signifikan terhadap upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dana pensiun syariah. Kajian literatur

mengungkapkan bahwa implementasi teknologi dalam konteks dana pensiun syariah mencakup beberapa aspek, termasuk pemanfaatan blockchain, artificial intelligence (AI), dan platform digital untuk pelaporan.

(Aminin, 2024) mengeksplorasi potensi teknologi blockchain dalam meningkatkan transparansi dana pensiun syariah. Studi tersebut mengidentifikasi bahwa implementasi blockchain dapat mengatasi tantangan utama dalam transparansi, termasuk verifikasi transaksi, pelacakan aset, dan pengungkapan risiko. Sistem berbasis blockchain memungkinkan peserta dana pensiun untuk memverifikasi kesesuaian investasi dengan prinsip syariah secara real-time, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap pengelolaan dana. Namun, (Aisah et al., 2025) mengemukakan bahwa adopsi blockchain masih dalam tahap awal di industri dana pensiun syariah, dengan hanya beberapa lembaga di Malaysia dan Uni Emirat Arab yang telah mengimplementasikannya.

Terkait penggunaan AI, (Elman Nafidzi, 2025) meneliti implementasi algoritma machine learning untuk mengoptimalkan proses screening syariah dan monitoring kepatuhan. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan AI dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam proses screening investasi syariah, serta memungkinkan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran prinsip syariah. Lebih lanjut, (Fithri, 2024) mengidentifikasi penggunaan AI dalam analisis sentiment terhadap laporan keuangan dana pensiun syariah, yang membantu mengidentifikasi area-area yang memerlukan transparansi lebih tinggi.

Platform digital untuk pelaporan juga menjadi fokus dalam literatur. (Dontes putra, 2024) menganalisis pengembangan dashboard digital untuk peserta dana pensiun syariah di Indonesia. Platform ini memungkinkan peserta untuk mengakses informasi terkait portofolio investasi, kinerja dana, dan kepatuhan syariah secara transparan. Studi tersebut menemukan bahwa implementasi dashboard digital meningkatkan tingkat kepuasan peserta dan kepercayaan terhadap pengelolaan dana pensiun syariah. Sementara itu, (Saro et al., 2022) mengidentifikasi bahwa penggunaan aplikasi mobile untuk pelaporan dana pensiun syariah telah diadopsi oleh 65% lembaga yang diteliti di Malaysia, meskipun tingkat kecanggihan fitur transparansi masih bervariasi.

Meskipun demikian, (Habibi et al., 2025) memperingatkan bahwa implementasi teknologi juga membawa tantangan baru, termasuk keamanan data, privasi, dan kebutuhan akan literasi digital di kalangan peserta dana pensiun. Studi tersebut merekomendasikan pendekatan bertahap dalam adopsi teknologi, dengan penekanan pada edukasi peserta dan pengembangan infrastruktur keamanan yang memadai.

Standar Audit Syariah dalam Dana Pensiun

Kajian literatur menunjukkan bahwa standar audit syariah merupakan komponen penting dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas dana pensiun syariah. (Jabeen et al., 2021) mengidentifikasi tiga kerangka standar audit syariah utama yang digunakan dalam industri keuangan syariah global: standar AAOIFI, standar Islamic Financial Services Board (IFSB), dan standar nasional yang dikembangkan oleh regulator di masing-masing negara.

(Miftah Nurasyhari et al., 2024) menemukan bahwa penerapan standar audit syariah AAOIFI secara signifikan meningkatkan kualitas pengungkapan informasi pada dana pensiun syariah, terutama dalam aspek zakat, penyaringan pendapatan non-halal, dan mekanisme purifikasi. Namun, studi tersebut juga menggarisbawahi bahwa tingkat adopsi standar AAOIFI bervariasi secara signifikan di berbagai yurisdiksi, dengan tingkat adopsi tertinggi di negara-negara Teluk dan relatif rendah di Asia Tenggara.

Terkait dengan proses audit syariah, (Yusri Hazrol Yusoff, Mohammad Aqil Fikri Nor Hisham, Nur Azlin Sofia Mohamed Noordin, Siti Nur Mahirah Athirah Amrel, Siti Nur Nabilah Isnin, 2024) mengidentifikasi lima tahapan kunci dalam audit syariah untuk dana pensiun yaitu perencanaan audit, pengembangan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan, dan tindak lanjut. Studi ini mengemukakan bahwa mayoritas dana pensiun syariah masih fokus pada aspek kepatuhan syariah dalam investasi (83%), sementara aspek operasional seperti pembagian surplus dan pengelolaan risiko masih kurang mendapat perhatian dalam proses audit (hanya 47%).

(Etika et al., 2022) mengeksplorasi independensi auditor syariah dan dampaknya terhadap kualitas audit. Penelitian ini menemukan bahwa independensi auditor merupakan faktor kritis dalam memastikan objektivitas proses audit syariah, namun banyak dana pensiun syariah yang masih menggunakan auditor internal yang mungkin dipengaruhi oleh tekanan organisasional. Studi tersebut merekomendasikan penggunaan auditor syariah eksternal untuk meningkatkan independensi dan kredibilitas proses audit.

Di Indonesia, (SARI & Suryanto, 2024) menganalisis kerangka audit syariah yang diterapkan pada dana pensiun syariah. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa mayoritas dana pensiun syariah di Indonesia mengadopsi standar audit nasional yang diadaptasi dari standar internasional seperti AAOIFI dan IFSB. Namun, studi tersebut juga menemukan kesenjangan dalam implementasi standar audit syariah, terutama berkaitan dengan kurangnya auditor yang memiliki kompetensi ganda dalam audit konvensional dan prinsip-prinsip syariah.

PEMBAHASAN

Tantangan dalam Transparansi dan Akuntabilitas Dana Pensiun Syariah

Hasil kajian literatur mengungkapkan beberapa tantangan utama dalam implementasi transparansi dan akuntabilitas dana pensiun syariah. Terdapat keragaman signifikan dalam standar dan praktik pelaporan yang diterapkan oleh dana pensiun syariah di berbagai yurisdiksi. Meskipun standar AAOIFI dan IFSB telah dikembangkan sebagai kerangka acuan global, adopsinya masih bersifat sukarela di banyak negara, yang menyebabkan inkonsistensi dalam praktik pelaporan (Abozaid, 2020). Situasi ini dipersulit oleh adanya dual regulatory framework di negara-negara dengan sistem keuangan ganda, di mana dana pensiun syariah harus mematuhi regulasi konvensional dan syariah secara bersamaan.

Terdapat keterbatasan dalam pengungkapan informasi investasi yang komprehensif. Beberapa studi mengindikasikan bahwa dana pensiun syariah cenderung memberikan informasi agregat tentang portofolio investasi tanpa rincian

memadai tentang proses penyaringan syariah dan komposisi aset yang spesifik (Mahfooz & Ahmed, 2014). Hal ini mengurangi kemampuan peserta untuk mengevaluasi kesesuaian investasi dengan prinsip syariah dan profil risiko personal mereka.

Independensi dan efektivitas Dewan Pengawas Syariah (DPS) masih menjadi isu yang kontroversial. Beberapa penelitian mengidentifikasi tantangan terkait konflik kepentingan, terutama ketika anggota DPS menjabat di beberapa lembaga keuangan secara bersamaan (Alvera Zahvania Putri, Defa Irfantara Pramudya, 2025). Selain itu, terdapat keterbatasan dalam akses DPS terhadap informasi operasional yang komprehensif, yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk melakukan pengawasan yang efektif.

Adopsi teknologi untuk meningkatkan transparansi masih dalam tahap awal di banyak yurisdiksi. Meskipun teknologi seperti blockchain dan AI memiliki potensi signifikan, implementasinya dihadapkan pada tantangan seperti biaya investasi yang tinggi, kebutuhan akan keahlian teknis, dan kekhawatiran terkait keamanan data (Pradana et al., n.d.). Selain itu, kesenjangan literasi digital di kalangan peserta dana pensiun dapat membatasi efektivitas solusi teknologi dalam meningkatkan transparansi.

Praktik Terbaik dan Inovasi dalam Pengelolaan Dana Pensiun Syariah

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, kajian literatur juga mengungkapkan beberapa praktik terbaik dan inovasi yang telah dikembangkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dana pensiun syariah. Di Malaysia, pendekatan pengawasan syariah terpusat melalui Shariah Advisory Council telah terbukti efektif dalam standarisasi keputusan syariah dan mengurangi risiko konflik kepentingan (Ramli et al., 2023). Model ini memungkinkan harmonisasi interpretasi syariah dan meningkatkan konsistensi dalam praktik pengelolaan dana pensiun syariah di tingkat nasional.

Dalam aspek pelaporan keuangan, beberapa dana pensiun syariah di Bahrain dan Uni Emirat Arab telah mengadopsi pendekatan "dual disclosure" yang menggabungkan standar akuntansi internasional (IFRS) dengan standar khusus untuk lembaga keuangan syariah (AAOIFI). Pendekatan ini memungkinkan dana pensiun syariah untuk memenuhi ekspektasi investor konvensional sekaligus memberikan informasi spesifik yang relevan dengan prinsip syariah (Ahmed, 2020).

Inovasi teknologi juga telah menghasilkan solusi yang menjanjikan untuk meningkatkan transparansi. Implementasi platform blockchain oleh beberapa dana pensiun syariah di Malaysia telah memungkinkan verifikasi real-time terhadap transaksi dan pelacakan aset, sehingga meningkatkan kepercayaan peserta terhadap pengelolaan dana (Ali & Jadidah, 2024). Sementara itu, pengembangan dashboard digital dan aplikasi mobile di Indonesia telah terbukti efektif dalam meningkatkan aksesibilitas informasi bagi peserta dana pensiun syariah (Ali & Jadidah, 2024).

Dalam konteks audit syariah, beberapa dana pensiun syariah telah mengadopsi model "continuous auditing" yang memungkinkan pemantauan kepatuhan syariah secara berkelanjutan, bukan hanya pada interval periodik. Pendekatan ini, yang didukung oleh teknologi otomatisasi, memungkinkan deteksi dini terhadap potensi

pelanggaran prinsip syariah dan respons yang lebih cepat terhadap isu-isu kepatuhan (Sugiarto, 2022).

Implikasi Teoritis dan Praktis

Temuan dari kajian literatur ini memiliki implikasi teoritis dan praktis yang signifikan. Dari perspektif teoritis, penelitian ini memperluas pemahaman tentang penerapan konsep transparansi dan akuntabilitas dalam konteks keuangan Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam dana pensiun syariah tidak hanya mencakup dimensi finansial, tetapi juga dimensi etis dan kepatuhan syariah yang kompleks. Hal ini memperkaya discourse akademis tentang tata kelola keuangan Islam dan memberikan landasan konseptual untuk pengembangan kerangka transparansi yang lebih komprehensif.

Selain itu, temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa teori agensi konvensional mungkin tidak sepenuhnya menjelaskan dinamika hubungan antara pengelola dana pensiun syariah, peserta, dan pemangku kepentingan lainnya. Kompleksitas tambahan yang muncul dari kebutuhan untuk mematuhi prinsip syariah, peran DPS, dan konsep tanggung jawab menyeluruh (takaful) mengharuskan pengembangan kerangka teoritis yang lebih kontekstual untuk memahami transparansi dan akuntabilitas dalam institusi keuangan syariah.

Dari perspektif praktis, penelitian ini menyoroti kebutuhan akan standar pelaporan yang lebih komprehensif dan konsisten untuk dana pensiun syariah. Regulasi yang menyelaraskan standar akuntansi internasional dengan prinsip syariah dapat memfasilitasi transparansi dan komparabilitas yang lebih baik dalam laporan keuangan. Selain itu, temuan terkait efektivitas DPS menunjukkan pentingnya memperkuat independensi dan kompetensi anggota DPS, serta memastikan akses mereka terhadap informasi operasional yang komprehensif.

Penggunaan teknologi seperti blockchain dan AI juga membuka peluang baru untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Namun, implementasi teknologi ini perlu didukung oleh kerangka regulasi yang memadai dan edukasi bagi pemangku kepentingan. Dalam konteks audit syariah, penelitian ini menunjukkan pentingnya pengembangan metodologi audit yang mengintegrasikan aspek kepatuhan syariah dan keuangan, serta peningkatan kompetensi auditor dalam kedua bidang tersebut.

1. Keterbatasan Penelitian

Meskipun penelitian ini telah berupaya untuk memberikan tinjauan komprehensif tentang transparansi dan akuntabilitas dana pensiun syariah, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, kajian ini hanya mencakup literatur berbahasa Inggris dan Indonesia, sehingga mungkin tidak menangkap perspektif dari literatur dalam bahasa Arab atau bahasa lain yang relevan dengan keuangan syariah. Kedua, meskipun penelitian ini mencakup studi dari berbagai negara, terdapat ketidakseimbangan geografis dengan dominasi studi dari Malaysia dan Indonesia, yang mungkin tidak merepresentasikan praktik di semua yurisdiksi dengan industri keuangan syariah yang signifikan. Ketiga, literatur yang dianalisis dalam penelitian ini terutama terdiri dari studi akademis, sehingga mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan praktik aktual di industri. Kajian terhadap dokumen regulasi, laporan tahunan, dan sumber primer lainnya dapat memberikan

pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik transparansi dan akuntabilitas. Keempat, penelitian ini tidak melakukan meta-analisis kuantitatif terhadap temuan dari studi-studi yang dianalisis, sehingga kesimpulan yang diambil bersifat deskriptif dan interpretatif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Tinjauan sistematis literatur ini telah memberikan pemahaman komprehensif tentang transparansi dan akuntabilitas dana pensiun syariah. Berdasarkan analisis terhadap 36 artikel yang diterbitkan antara tahun 2013 hingga 2024, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat perkembangan signifikan dalam praktik transparansi dan akuntabilitas dana pensiun syariah, masih terdapat tantangan dan kesenjangan yang perlu diatasi.

Penelitian ini mengidentifikasi empat dimensi utama transparansi dan akuntabilitas dana pensiun syariah: praktik transparansi dan pelaporan keuangan, peran Dewan Pengawas Syariah, implementasi teknologi, dan standar audit syariah. Dalam konteks praktik transparansi, terdapat variasi signifikan antara berbagai yurisdiksi, dengan tingkat transparansi yang lebih tinggi di negara-negara dengan regulasi keuangan syariah yang matang seperti Malaysia dan Bahrain. Dimensi utama transparansi meliputi pengungkapan informasi investasi, mekanisme penyalangan syariah, distribusi surplus, pengungkapan biaya, dan pengungkapan risiko.

Dewan Pengawas Syariah memainkan peran krusial dalam memastikan akuntabilitas dana pensiun syariah, meskipun efektivitasnya dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti independensi, kompetensi, dan akses terhadap informasi. Model pengawasan syariah terpusat, seperti yang diterapkan di Malaysia, telah terbukti efektif dalam standardisasi keputusan syariah dan mengurangi risiko konflik kepentingan.

Implementasi teknologi seperti blockchain, AI, dan platform digital memiliki potensi signifikan untuk meningkatkan transparansi dana pensiun syariah. Namun, adopsi teknologi ini masih dalam tahap awal di banyak yurisdiksi dan dihadapkan pada tantangan seperti biaya investasi yang tinggi, kebutuhan akan keahlian teknis, dan kekhawatiran terkait keamanan data.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, berikut beberapa saran untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dana pensiun syariah:

1. Pengembangan Kerangka Regulasi yang Komprehensif: Regulator perlu mengembangkan kerangka regulasi yang mengharmonisasi standar akuntansi internasional dengan prinsip-prinsip syariah. Kerangka ini harus mencakup persyaratan spesifik untuk pengungkapan informasi investasi, mekanisme penyalangan syariah, distribusi surplus, dan pengungkapan risiko.
2. Penguatan Peran Dewan Pengawas Syariah: Institusi dana pensiun syariah perlu memperkuat independensi dan kompetensi anggota DPS, serta memastikan akses mereka terhadap informasi operasional yang komprehensif. Model pengawasan syariah terpusat, seperti yang diterapkan di Malaysia, dapat dijadikan referensi

untuk yurisdiksi lain.

3. Adopsi Teknologi Secara Strategis: Dana pensiun syariah perlu mengadopsi teknologi seperti blockchain, AI, dan platform digital secara strategis untuk meningkatkan transparansi. Implementasi teknologi ini perlu didukung oleh investasi dalam keamanan data dan edukasi bagi pemangku kepentingan.
4. Pengembangan Standar Audit Syariah yang Terintegrasi: Lembaga standar seperti AAOIFI dan IFSB perlu mengembangkan standar audit yang mengintegrasikan aspek kepatuhan syariah dan keuangan. Harmonisasi standar ini di berbagai yurisdiksi akan memfasilitasi komparabilitas dan transparansi yang lebih baik.
5. Edukasi dan Peningkatan Kapasitas: Institusi pendidikan dan profesional perlu meningkatkan program pelatihan untuk mengembangkan kompetensi di bidang keuangan syariah, audit syariah, dan teknologi finansial syariah. Hal ini akan membantu mengatasi kesenjangan keahlian yang dapat menghambat implementasi praktik transparansi dan akuntabilitas yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abozaid, A. (2020). Shortcomings and proposed reforms in the existing shariah governance of islamic banking. *Indonesian Journal of Islamic Economics Research*, 2(1), 15–34. <https://www.academia.edu/download/70097852/1647.pdf>
- Ahmed, M. U. (2020). Financial Reporting of Islamic Financial Institutions: Comparative Analysis of AAOIFI and IFRS. In *Handbook of Research on Theory and Practice of Global Islamic Finance* (pp. 854–873). IGI Global.
- Aisah, N., Putri, S. Z. J., & Hafizi, M. R. (2025). Blockchain Technology Innovation As an Optimization of Transaction Security in Islamic Financial Institutions. *Journal of Central Banking Law and Institutions*, 4(1), 23–48. <https://doi.org/10.21098/jcli.v4i1.265>
- Ali, S., & Jadidah, A. N. (2024). Peran Teknologi dalam Optimalisasi Pengumpulan dan Distribusi Zakat Dan Wakaf. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam Volume*, 10(2), 400–414.
- Alvera Zahvania Putri, Defa Irfantara Pramudya, B. N. A. (2025). Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Menjamin Kualitas Produk pada Bank Syariah Indonesia (BSI). *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi*, 3(1), 264–276.
- Aminin, R. I. (2024). Analisis Implementasi Teknologi Blockchain dalam Meningkatkan Transparansi , Efisiensi , dan Keamanan Transaksi Keuangan Perbankan Syariah Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 92–106.
- Ash-Shiddiqy, M. (2023). How are Islamic Pension Funds Efforts in Advancing Islamic Financial Institutions in Indonesia. *Journal of Islamic Economy, Finance, and Banking*, 7(June), 138–151.
- Dahlan, N. H. M., Jalil, A. Z. A., Zainol, Z., & Maamor, S. (2016). The Shariah Advisory Council in the Malaysian Islamic financial institutions: Features and legal issues. *Journal for Global Business Advancement*, 9(3), 284–298. <https://doi.org/10.1504/JGBA.2016.076718>
- Dontes putra. (2024). Implementasi Sharia Complaine dalam Platform Crowdfunding Syariah bagi UMKM Studi Kasus: PT Shafiq Digital Indonesia. *Al-*

- Mutsila: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 6(1), 156–180.
<https://doi.org/10.46870/jstain.v6i1.939>
- Eka Arlinda Hafid, Sri Nurul Nabila, Kamaruddin, S. (2024). Model Pengelolaan Dana Pensiun Berbasis Syariah: Tantangan dan Peluang di Industri Keuangan Non-Bank. *JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES*, 5(3), 824–837.
<https://doi.org/10.37274/mauriduna.v5i2.1284>
- Elman Nafidzi, K. M. (2025). Peluang, Strategi, Dan Tantangan Industri Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Artificial Intelligence (AI). *Journal of International Multidisciplinary Research*, 3(2), 68–76.
- Etika, C., Liya Ermawati, & Junaini Bustami. (2022). Analisis Pengaruh Independensi Auditor dan Pendidikan Auditor Terhadap Kualitas Audit Syariah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(1), 17–28. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(1\).9515](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(1).9515)
- Fithri, W. D. Z. (2024). Determinan Kinerja Keuangan dalam Mempengaruhi Inklusivitas Peserta Dana Pensiun Syariah di Indonesia (Periode 2019-2023). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 547. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11168>
- Habibi, S. A., Prambudi, G. S., Trisnawati, T., & Wulandari, R. (2025). Transformasi Digital Administrasi Pertanahan: Implementasi Dan Tantangan Sertipikat Elektronik Di Indonesia. *Rio Law Jurnal Volume.*, 1(2).
- Ivazhada Marella Edgina, SE., M.Esy. (2023). Urgensi Auditor Syariah Pada Industri Keuangan Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana*, 10(2), 1353–1359. <https://doi.org/10.35137/jabk.v10i2.18>
- Jabeen, Z., Saeed, U., & Ismail, M. (2021). URDU 1 POST IMPLEMENTATION CHALLENGES TOWARDS EXTERNAL SHARIAH AUDIT IN PAKISTAN A SYNTHESIS OF EXPERTS VIEWS-II: پاکستان میں *Habibia Islamicus (The ...)*, 5(2), 179–200.
<http://www.habibiaislamicus.com/index.php/hirj/article/view/186%0Ahttp://www.habibiaislamicus.com/index.php/hirj/article/download/186/337>
- Lestari, M. D., Melinda, A. E., Sari, M. I., & ... (2023). Analisa Peran DPS Dalam Pengawasan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Peran Perbankan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Di Indonesia*, 1(1), 105–120.
<https://ejurnal.stie-trianandra.ac.id/index.php/jubima/article/view/1452%0Ahttps://ejurnal.stie-trianandra.ac.id/index.php/jubima/article/download/1452/1226>
- Mahfooz, S. bin, & Ahmed, H. (2014). Shari'ah investment screening criteria: A critical review. *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics*, 27(1), 111–145.
<https://doi.org/10.4197/Islec.27-1.1>
- Miftah Nurasyhari, Desi krisnovi, Aprilia Rizki Pradani, Feri Setiawan, & Siti Aini Amaliyatun. (2024). Dana Pensiun Bank Syariah Indonesia. *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik*, 2(2), 192–197. <https://doi.org/10.61787/vfzdre25>
- Naufal Muhamad Shodiqin, Husni Rizallul Muslim, R. S. (2024). AKAD WADIAH YAD DHAMANNAH SEBAGAI INOVASI AKAD DANA PENSIUN DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH. *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 316–332.

- Nugroho, T. P. (2024). EVALUASI AUDIT SYARIAH : ANALISIS KEPATUHAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH TERHADAP PRINSIP-PRINSIP ISLAM MELALUI KAJIAN LITERATUR. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis*, 4(3), 18–25.
- Pangestu, C. P., Mugiyati, M., & Wigati, S. (2024). Perkembangan Perbankan Syariah di Dunia dan Kepatuhan terhadap Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. *Adilla: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 39–58. <https://e-resources.perpusnas.go.id:2993/contentitem/doi:10.52166/adilla.v7i2.6356?sid=ebsco:plink:crawler&id=ebsco:doi:10.52166/adilla.v7i2.6356&crl=c>
- Pradana, A. E., Herawati, A. R., & Dwimawanti, I. H. (n.d.). *Tantangan Kecerdasan Buatan Dalam Implikasi Kebijakan Pemerintah di Indonesia: Studi Literatur*.
- Purbaningrum, I. R., Luthfia, N., & Nasim, A. (2024). The Problems of Sharia Investment in Indonesia from The Perspective of Maqashid Al-Sharia. *The International Journal of Islamic Civilization Studies*, 7(2), 229–236. <https://doi.org/10.47076/jkpis.v7i2.306>
- Putri, A. F. (2023). Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Kepatuhan Prinsip Syariah Pada Bank Syariah. *Jurist-Diction*, 6(1), 189. <https://doi.org/10.20473/ydk.v3i2.4632>
- Putri, L. A., & Nurbaiti, B. (2024). *Pengaruh Kualitas Informasi , Dukungan Manajemen , dan Teknologi Informasi terhadap Efektivitas Pengambilan Keputusan Eksekutif*. 2(2), 97–102.
- Rama, A. (2015). Analisis Kerangka Regulasi Model Shariah Governance Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol1.iss1.art1>
- Ramli, N., Musafar Hammed, L. B., Mohammad Suhaimi, A. F., & Furqani, H. (2023). Perbandingan Kerangka Tadbir Urus Perbankan Islam di antara Indonesia dan Malaysia. *Journal of Management and Muamalah*, 13(1), 44–55. <https://doi.org/10.53840/jmm.v13i1.140>
- Rangga Ananda Ardiyansa, Risma Aulia Irawan, Wildan Taupiqur Rahman Chudory, Z. A. (2024). Transformasi Inovatif Produk Dana Pensiun Syariah: Strategi Meningkatkan Ketertarikan dan Keterlibatan Peserta Rangga. *JEMBA Journal of Economics, Management, Business and Accounting*, 2(3), 110–118.
- Rizkia, A. E., Drika, A. P., Rahmawati, L., & Dina, F. A. (2024). *Perkembangan dan pemanfaatan dana pensiun syariah di Indonesia untuk jaminan hari tua*. 3(3).
- SARI, Y. A., & Suryanto, T. (2024). Tantangan Audit Syariah Di Asia Tenggara : Studi Perbandingan Indonesia Dan Malaysia. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, 22(1), 83–92. <https://doi.org/10.21831/jpai.v22i1.68208>
- Saro, N., Bhari, A., & Mat Rani, A. (2022). Application in Financial Management Among Malaysia’S Zakat Management Institutions. *Journal of Information System and Technology Management*, 7(26), 32–42. <https://doi.org/10.35631/jistm.726003>
- Subardi, H. M. P. (2019). Kebutuhan AAOIFI Sebagai Standar Akuntansi Keuangan Syariah Dalam Harmonisasi Penyajian Laporan Keuangan. *Owner Riset & JURNAL AKUNTANSI*, 3(1), 16. <https://doi.org/10.33395/owner.v3i1.81>

- Sugiarto, K. (2022). PENERAPAN AUDIT SYARIAH PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT (STUDI KASIS DI LAZ DPU KALTIM). *Jurnal Ekonomika : Manajemen, Akuntansi, Dan Perbankan Syari'ah*, 11(2), 97–110.
- Walid In'am Ahmad, M. Y. (2025). Mekanisme dan Implementasi Pengelolaan Dana Pensiun Syariah Terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 pada Bank Syariah Indonesia Cabang Gresik. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah*, 7(3), 2547–2562. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i3.5767>
- Yusri Hazrol Yusoff, Mohammad Aqil Fikri Nor Hisham, Nur Azlin Sofia Mohamed Noordin, Siti Nur Mahirah Athirah Amrel, Siti Nur Nabilah Isnin, M. S. I. (2024). *Role of Internal Shariah Audit to Detect Non-Shariah Compliance*. VIII(X), 1175–1189. <https://doi.org/10.47772/IJRISS>